

VISI PERDAMAIAN DALAM PENGAJARAN SEJARAH PEMIKIRAN ISLAM (Studi Kritis Kurikulum Pendidikan)

Ibnu Rusydi
Universitas Wiralodra Indramayu
iben.rusydi@gmail.com

Abstrak

Islam adalah agama wahyu yang diturunkan dari langit dan hidup dalam ruang sejarah manusia. Interpretasi atas ajaran Islam melahirkan pemikiran yang beragam. Guru-guru agama Islam mengajarkan sejarah pemikiran Islam di lembaga-lembaga pendidikan, dari generasi ke generasi. Satu problem berbahaya muncul tatkala pengajaran sejarah pemikiran Islam tersebut tidak dilandasi oleh visi perdamaian. Dampaknya sering kali berupa fanatisme generasi muda terhadap satu aliran pemikiran yang berujung pada anarkisme dan radikalisme, atau setidaknya fanatik buta yang tidak kritis. Visi perdamaian dalam pengajaran sejarah pemikiran Islam adalah tawaran filosofis terhadap dunia pendidikan tentang metode pengajaran yang ideal.

Kata Kunci: *Perdamaian, pengajaran, pemikiran Islam.*

Abstract

THE VISION OF PEACE IN ISLAMIC HISTORY THOUGH (The Critical Study Curriculum Education): Moslem is the religion that revelation from heaven and lives in human history. The interpretation of Islamic teachings spawned diverse thinking. The Islamic lecturers teach about the thought of Islamic history in some institutions generation through generation. One problem appeared when the teaching of Islamic doesn't have the basic peace basic. Then impact is the fanatic in young generation toward

a certain though which leads to the anarchism and radicalism or blind fanatic uncritical point of view. The peace vision in the Islamic point of view is an ideal philosophical bid for education on teaching methods.

Keywords: *Peace, teaching, Islamic thought.*

A. Pendahuluan

Dunia hari ini dihantui perasaan takut setiap waktu. Tidak ada satu negara pun, baik yang berpenduduk muslim maupun non-muslim, yang merasa aman dari ancaman teroris. Negara-negara Timur Tengah tidak henti-hentinya berperang atas nama agama. Negara-negara Eropa, seperti Perancis, juga sempat menjadi sasaran terorisme dari kaum radikal. Ditambah lagi, orang-orang yang bergabung pada jaringan teroris tidak saja dari mereka yang berkulit kuning, merah, hitam, tetapi juga berkulit putih. Dengan kata lain, setiap etnis bisa saja berpotensi menjadi seorang teroris internasional.¹

Fenomena terorisme internasional, terlepas dari motif ekonomi dan politik di baliknya, juga tidak bisa lepas dari faktor bagaimana pemikiran Islam diajarkan, didakwahkan, diindoktrinasi. Di sinilah konteks pendidikan dan pengajaran menemukan relevansinya. Para ideolog Islam garis keras merekrut banyak anggota dengan cara menanamkan keyakinan tentang ajaran Islam yang benar versi mereka. Pendidikan dan pengajaran Islam difilter hanya untuk melegitimasi pandangan yang mendukung gerakan radikal mereka.²

Sistem pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan besar, mengingat ada keterlibatan warga Indonesia yang turut bergabung pada jaringan terorisme Internasional, salah satu dari

¹ Ben Farmer, "Paris Attack, What We Know about the Suspects", dalam <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france>, diakses pada 29 Desember 2015

² Sejatinya ada hubungan erat antara kemiskinan, pendidikan dan terorisme. Dalam sebuah analisis kritis telah disampaikan oleh Claude Berrebi, "Evidence about the Link Between Education, Poverty and Terrorism among Palestinians", dalam jurnal *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, Volume 3, Issue 1, Article 2, The Berkeley Electronic Press, 2007.

mereka telah berangkat ke Timur Tengah.³ Hal ini sungguh tidak bisa dipercaya mengingat bangsa Indonesia adalah mayoritas muslim yang damai, anti-kekerasan, dan menentang setiap tindakan yang menciderai nama baik Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Satu-satunya penjelasan yang dapat diajukan dari perspektif pendidikan adalah salahnya kurikulum dan metode pengajaran pemikiran Islam.

Kurikulum pendidikan Islam di Indonesia seharusnya memberi ruang kritis komprehensif dalam mengajarkan nilai-nilai agama. Dalam sejarah pertumbuhan pemikiran Islam, setidaknya ada tiga klasifikasi utama yang bisa dipaparkan, yaitu Islam ala *fuqaha*, Islam ala *mutakallimun*, dan Islam ala *mutasawwifin*. Tiga klasifikasi ini terus bertumbuh kembang dalam perjalanan waktu sehingga melahirkan madzhab-madzhab yang beragam.⁴ Pengajaran pemikiran Islam yang tidak kritis dan komprehensif dapat saja melahirkan pemahaman tentang Islam yang parsial. Pengetahuan yang parsial mendorong generasi muda atau umat muslim terjebak pada ‘perspektif kacamata kuda’. Dalam artian, Islam dipahami secara dangkal, dan secara emosional mendorong pengikutnya untuk bertindak subjektif.⁵

Label ‘tindakan subjektif’ ini sangat pantas dilekatkan kepada kaum radikal fundamentalis itu, mengingat apa yang mereka lakukan belum selesai dibicarakan secara akademik-ilmiah dan diperdebatkan dalam ruang terbuka. Dakwah-dakwah kaum radikali juga acap kali dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, menghindari keramaian dan keterbukaan. Itu semua adalah indikator kesadaran alam bawah sadar bahwa apa yang mereka lakukan sejatinya salah dan bertentangan dengan hukum maupun nilai-

³ Sarah Dingle, “Islamic State training new generation of Indonesian terrorists, expert Sidney Jones warns”, dalam <http://www.abc.net.au/news/2015-10-08/>, diakses 29 Desember 2015. Lihat juga laporan dari Fedina S. Sundaryani, “Son of Bali bomber dies in Syria”, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/17/>, diakses 29 Desember 2015.

⁴ Bruce B. Lawrence, *Who Is Allah?*, (USA: University of North Carolina Press, 2015), hlm. 57

⁵ J. Mark Halsteda, “Towards a Unified View of Islamic Education”, dalam *Islam and Christian-Muslim Relations*,

Volume 6, Issue 1, 1995 dan dipublikasikan online oleh Routledge, 2007, hlm. 25-43

nilai kemanusiaan universal. Jika keyakinan kaum teroris itu benar di mata hukum internasional dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan nilai humanisme universal maka ruang untuk diskusi akademik ilmiah selalu dibuka lebar oleh mereka.⁶

Pada dasarnya, fenomena terorisme dan radikalisme regional maupun internasional adalah persoalan metodologi pengajaran dan sistem pendidikan yang mereka bangun. Islam yang parsial dimasukkan menjadi bagian kurikulum pendidikan, kritisisme dipangkas, doktrinasi dikedepankan, dan anarkisme brutal dijadikan visi pengajaran dalam melahirkan *out-put* yang diharapkan. Sebagai upaya '*counter-attack*' terhadap model pendidikan mereka, membangun visi perdamaian dalam pengajaran pemikiran Islam merupakan langkah awal yang harus diwujudkan.⁷

Tulisan ini akan mengambil pendekatan historis dan edukatif untuk menghasilkan pemahaman holistik tentang pertumbuhan pemikiran Islam dalam rentang sejarah, bagaimana seharusnya diajarkan dan dipahami, dan bagaimana model menyikapi perkembangan hidup yang pesat melalui kaca mata Islam. Dengan menggunakan interpretasi hermeneutis, tulisan ini mencoba menggali konteks dan spirit setiap pemikiran Islam yang pernah diciptakan manusia, yang kelak berguna sebagai bahan pengajaran di lembaga pendidikan Islam pada umumnya.

Hermeneutika secara etimologis adalah *hermeneuin*, menerjemahkan, yang berarti sebuah usaha manusia untuk beralih dari kondisi tidak tahu menjadi tahu.⁸ Ketika berhadapan dengan

⁶ Ada banyak cara yang digunakan jaringan teroris global dalam merekrut massa. Tetapi, dalam konteks Indonesia, rekrutmen kalangan teroris selalu diam-diam, underground. Lihat Scott Gerwehr dan Sara Daly, "Al-Qaida: Terrorist Selection and Recruitment", dalam *Al-Qaidah and Global Jihad*, Santa Monica: RAND Corporation, National Defense Research Institute, 2006, hlm. 73-87

⁷ Pendidikan kritis menjadi salah satu langkah mematahkan nalar logika yang digunakan teroris dalam pengajaran mereka. Lihat saran dari Max Abrahms, "What Terrorists Really Want: Terrorist Motives and Counterterrorism Strategy," dalam *International Security*, the President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology, Vol. 32, No. 4, 2008, hlm. 78-105

⁸ Nafisul Atho dan Arif Fahrudin, *Hermeneutika Transendental*,

teks maka seorang pembaca tidak bisa dihindarkan dari situasi interpretatif, tindakan pembacaan untuk memahami kandungan teks sesuai tingkat pengetahuan pribadinya. Dengan begitu, proses hermeneutis bekerja secara otomatis.⁹

Dalam konteks tulisan ini, hermeneutika menjadi semacam prinsip metodologis interpretatif untuk memahami teks-teks sejarah, terlebih yang berkaitan dengan pemikiran Islam. melalui kegiatan interpretasi tersebut, konteks dan spirit sebuah narasi sejarah dapat diungkap dengan lebih jelas. Hans Georg Gadamer mengatakan bahwa hermeneutika adalah fenomena pemahaman, bagaimana mengungkapkannya sebagaimana adanya, dan bagaimana memahaminya sebagaimana adanya.¹⁰ Dari sini penulis memahami bahwa tulisan ini adalah wacana yang lahir dari pemahaman penulis tentang proses tumbuhnya pemikiran Islam dalam sejarah, bagaimana pemikiran Islam seharusnya diajarkan kepada generasi penerus, dan pemikiran Islam macam apa yang harus dihidari karena tidak sesuai dengan spirit Islam yang ideal.

Karena dirasa tidak cukup sekedar menggali dan mengetahui apa yang ideal melalui metode hermeneutis, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana cara menyampaikan idealisme itu melalui kerangka pendidikan, maka pendekatan edukasi perlu ditambahkan. Tujuannya adalah membantu memberi penajaman pembacaan kritis ini. Melalui pendekatan pendidikan ini, pemahaman tentang semua problem pendidikan dapat dipertajam, masalah-masalah penting yang muncul dalam dunia pendidikan dan konsep-konsep yang mendasarinya dapat dipetakan dengan baik, hubungan setiap masalah tersebut dengan struktur yang mendukungnya dapat diketahui, serta pendekatan-pendekatan di masa mendatang untuk memecahkan masalah tersebut juga dapat dirumuskan. Semua ini sebagai fungsi dari kurikulum.¹¹

(Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 132

⁹ Mudjia Rahardjo, *Hermeneutika Gadamerian Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS(Anggota IKAPI), 2010), alm. 88-89

¹⁰ Poesprodjo, *Hermeneutika*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 94

¹¹ Mohammad Ali (penyunt.), *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Bagian I: Ilmu Pendidikan Teoritis*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 96

B. Spirit Sejarah Pemikiran Islam sebagai Inti Pembelajaran

Untuk membangun pendidikan bervisi perdamaian harus dimulai dari membentuk kurikulum pendidikan yang kritis lebih dulu. Kurikulum pendidikan yang kritis membutuhkan landasan filosofis yang kokoh dan mengakar dalam tradisi umat muslim. Satu-satunya cara mengungkap dan menggali spirit dari seluruh pemikiran Islam yang lahir di sepanjang sejarah bukanlah perkara mudah. Tetapi, rintisan awal perlu digagas dan biar generasi mendatang yang akan menyempurnakannya. Langkah pertama yang harus dituntaskan adalah menjawab apa spirit dan nilai utama dari seluruh perkembangan pemikiran Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibutuhkan mengurai tiga sejarah disiplin ilmu pengetahuan Islam yang berbeda, yaitu sejarah pertumbuhan ilmu fiqh, ilmu *Kalam* dan ilmu tasawuf. Dari narasi historis ketiga disiplin ini akan tampak spirit utama yang menjadi benang merah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Islam.

1. Sejarah Perkembangan Ilmu Fiqh

Sebelum membicarakan perkembangan ilmu fiqh, terlebih dahulu penting menjelaskan hakikat definitif ilmu fiqh itu sendiri. Menurut Said Aqil Siradj, 'fiqh' adalah produk pemikiran ulama pada suatu masa dan di suatu kawasan tertentu, yang melakukan kajian kritis ilmiah untuk menjawab persoalan-persoalan umat, dengan berpijak kepada sumber-sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan hadits. Fiqh adalah produk pemikiran interpretatif ulama terhadap dalil-dalil al-Quran dan Hadits.¹² Setiap ulama yang sudah memiliki kapasitas mumpuni melakukan kajian kritis ilmiah (*istinbath al-hukm*) untuk menemukan hukum Islam disebut seorang Mujtahid, dan hasil riset ilmiahnya disebut fiqh. Ini adalah alasan utama mengapa perkembangan ilmu fiqh sangat dinamis dan progresif di dalam dunia Islam.

Fiqh Islam tentu saja berbeda dari Syariat Islam. Dua terminologi ini bagaikan bagian dan keseluruhan. Artinya, Fiqh bagian dari Syariat tetapi Syariat bukanlah Fiqh. Ismail

¹² Said Aqil Siradj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), hlm. 399

Muhammad Syah mengatakan bahwa syariah mencakup banyak aspek, yaitu akidah, akhlaq, ibadah dan muamalat. Apabila ajaran Islam berkenaan dan mengatur urusan keyakinan hati maka disiplin ilmunya disebut ilmu *Kalam*. Jika ajaran Islam membahas tentang etika dan akhlak maka disiplin ilmunya disebut ilmu tasawuf. Tetapi, jika ajaran Islam membahas tentang aturan-aturan hukum disebut ilmu fiqh. Jadi, ilmu fiqh tidak membahas persoalan etika maupun keyakinan melainkan sebagai norma, aturan, hukum, dan undang-undang Islam. Namun yang lebih penting dikatakan adalah pendapat Ismail Muhammad Syah bahwa semua perbedaan definitif semacam itu merupakan produk pemikiran manusia.¹³

Di titik ini dapat dimengerti bahwa para fuqaha (pakar ilmu fiqh) memiliki peran signifikan dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam dan menjadi aktor utama sejarah umat muslim, terlebih dalam konteks pembuatan hukum. Fuqaha maupun fiqh adalah 'anak jaman' yang lahir dalam ruang dan waktu sejarah, memiliki kehidupan dan konteks pemikiran, sehingga membahas tentang seorang ulama fiqh dan pemikiran fiqh sama saja mengharuskan pertanyaan lebih lanjut tentang kapan dan dimana; suatu pertanyaan yang menuntut uraian tentang waktu dan tempat. Jawaban yang komprehensif dan holistik mengenai biografi seorang ulama fiqh dan konteks sosial-politik pemikirannya adalah modal besar membangun kesadaran kritis bagi umat muslim.

Kesadaran kritis tersebut merupakan bahan dasar dan utama yang harus dimiliki oleh terutama pengelola pendidikan Islam, pihak yang memiliki otoritas untuk mengarahkan visi pendidikan dan membuat kurikulum, serta instrumen penting untuk menggali spirit dan nilai yang dikandung sejarah pemikiran Islam. Dengan kesadaran kritis itu, semua civitas akademika pendidikan Islam dapat mengarahkan lembaga pendidikan ke jalur yang benar, yaitu mencetak *out-put* pendidikan yang ideal, kritis, arif bijaksana, moderat dan berorientasi perdamaian dunia. Sebab, kesadaran kritis ini bekerja secara otomatis dan menawarkan pencerahan bahwa pada hakikatnya pemikiran Islam

¹³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 4

yang merentang sepanjang sejarah hanyalah produk pemikiran manusia belaka, yang sangat mungkin lekang oleh waktu, dan pada akhirnya tenggelam dalam arus sejarah, terlebih saat muncul pemikiran yang lebih kontekstual.

Misal, Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit adalah imam besar dalam Madzhab Hanafiyah. Ia hidup di kota Kufah yang banyak terpengaruh oleh kultur masyarakat Persia, dan sangat jauh dari kota Madinah yang kuat dengan tradisi haditsnya. Faktor sosiologis-geografis tersebut mendorong Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan 'ar-Ra'yu' atau rasio dalam menetapkan hukum fiqh daripada menggunakan hadits. Berbeda dengan Malik bin Anas al-Madani, pendiri Madzhab Maliki, yang hidup di Madinah dengan kultur masyarakat yang berbeda dari Persia. Dampaknya, Imam Malik lebih banyak menggunakan hadits dan amalan masyarakat Madinah sebagai rujukan hukum.¹⁴

Karakter dua tokoh besar dalam madzhab fiqh itu menyatu dalam pribadi Muhammad bin Idris bin Syafi'i al-Quraisyi, pendiri Madzhab Syafi'i. Berkat kegigihan dalam belajar dan menuntut ilmu, Imam Syafi'i pergi berguru kepada Imam Malik dan menguasai kitab al-Muwattha' dan juga kepada Imam Hasan asy-Syaibani untuk memperdalam ilmu madzhab Hanafiyah. Imam Syafi'i merasa tidak puas dengan metodologi Imam Malik maupun Imam Abu Hanifah. Tetapi, dengan mengkombinasikan dua metodologi mereka itu secara proporsional, Imam Syafi'i menemukan pola ideal manhaj fiqh Islam.¹⁵

Dalam konteks dialektika pemikiran Islam, posisi Imam Malaik dan Abu Hanifah seperti tesa dan anti-tesa, sedangkan Imam Syafi'i adalah sintesa dari keduanya. Tidak heran jika Nasr Hamid Abu Zaid mengomentari posisi Imam Syafi'i tersebut sebagai tokoh moderat yang mampu mendamaikan antara tradisionalisme madzhab Malikiyah dan rasionalisme madzhab Hanafiyah, kemudian menciptakan moderatisme Syafi'iyah.¹⁶

¹⁴ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UIP, 1986), hlm. 12-16

¹⁵ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Grafindo, 1997), hlm. 113

¹⁶ Nasr Hamid Abu Zaid, *Imam Syafi'i: Moderatisme, Eklektisme*,

Riwayat biografis para Imam fiqih ini sangatlah berguna terlebih untuk memberi kesadaran kritis bahwa para imam telah menyadari dan menjalani dunia akademik yang ilmiah dan kritis. Para imam madzhab adalah simbol kesadaran kritis yang mengerti dimana mereka tinggal, di jaman apa mereka hidup, dan bagaimana semestinya menyikapi intelektualisme, khususnya dalam memahami Islam.

Simbol kesadaran kritis lainnya terdapat pada sosok Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Halal bin Hilal bin As'ad bin Idris atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Ahmad pendiri Madzhab Hanbali. Sekalipun beliau hidup sejaman dengan Imam Syafi'i, berguru kepadanya, dan menguasai seluruh metodologi ijtihadnya, Imam Ahmad memiliki kecenderungan pribadi yang kelak berpengaruh besar pada substansi pemikirannya, yaitu hidup zuhud dan senang belajar hadits. Dalam madzhab Hanbali, kecenderungan porsi pemakaian al-Quran dan Hadits jauh lebih besar daripada madzhab Malikiyah dan porsi penggunaan rasio jauh lebih sedikit daripada madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah.¹⁷

Sampai di sini dapat disadari bahwa minat dan bakat seorang Ahmad bin Hanbal berpengaruh besar pada terbentuknya tipe struktur dan superstruktur madzhab Hanbali. Namun, sekalipun empat madzhab fiqih ini berbeda mencolok di level permukaan, pada level yang paling substansial, semuanya sama saja, yaitu sebagai cerminan dan manifestasi kecenderungan minat dan bakat masing-masing tokohnya. Logika yang bekerja dalam masing-masing madzhab merupakan gambaran tentang konteks sosial-kultural pendirinya. Kelak di kemudian hari, masing-masing madzhab ini dikembangkan oleh para murid mereka sehingga ajaran-ajarannya pun berkembang. Sering kali pendapat seorang mujtahid madzhab bertentangan dengan pendapat pendiri madzhabnya. Hal ini diakibatkan oleh faktor eksternal masing-masing individu yang berbeda.

Spirit sejarah pemikiran Islam yang semacam ini harus melandasi dari setiap upaya pembentukan kurikulum pendidikan

Arabisme, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 3

¹⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Grafindon, 1996), hlm. 155

yang bervisi perdamaian. Sebab, jika spirit sejarah ini tidak dipahami maka *out-put* pendidikan akan memahami Islam dengan tingkat pemahaman yang dangkal juga parsial. Dampak buruk lebih jauh, peserta didik memahami bahwa ajaran Islam bertentangan satu sama lain dan memang harus dipertentangkan supaya muncul pemenangnya. Logika seperti ini berbahaya karena menjadi modal utama untuk melakukan anarkisme atas nama perbedaan pandangan dan pemikiran tentang Islam.

2. Sejarah Perkembangan Ilmu *Kalam*

Spirit sejarah yang sama dapat pula digali dari perjalanan panjang perkembangan disiplin ilmu *Kalam*. Kebetulan saja terjadi dalam sejarah umat muslim bahwa pertumbuhan ilmu *Kalam* lebih dekat pada pergulatan perebutan kekuasaan dan jabatan. Dibandingkan dengan sejarah perkembangan ilmu fiqh yang lebih sosiologis-kultural, perkembangan *Kalam* sangat terkesan politis. Sekalipun objek material kajian ilmu *Kalam* adalah persoalan teologi (ilmu ketuhanan) namun unsur politik yang melatarbelakangi gerak progresif pertumbuhan ilmu *kalam* sangat kuat dan kentara.

Tujuan politik sebagai ‘ruh’ yang menggerakkan percepatan pertumbuhan Ilmu *Kalam* sejalan dengan analisa Al-Isfirayini bahwa mula-mula semua *firqoh* (partai) dalam Islam merupakan gerakan *siyasah* murni, tetapi untuk menopang motif-motif tersembunyi mereka batas-batas politik dilewati dengan membentuk madzhab-madzhab *Kalam*. *Harakah Siyasiyah* pun melebar menjadi *harakah ilmiah*, gerakan politik mengembangkan sayapnya menjadi gerakan akademis. Nalar-nalar logis sebagai upaya pembenaran bertubrukan satu sama lain antar pendukung madzhab yang berbeda.¹⁸

Kebutuhan umat muslim akan logika rasional demonstratif seperti itu membuka pintu kultural masuknya peradaban ‘asing’ seperti dari Yahudi, Kristen, Yunani maupun kaum Gnostik. Di level internasional pada masa itu, orang-orang Yahudi, Kristen, Yunani telah akrab dengan tradisi filsafat, sementara situasi politik

¹⁸ Abdul Qahir bin Thahir bin Muhammad bin Abdullah Al-Baghdadi Al-Isfirayini, *al-Farqū baina al-Firqah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t), hlm. 14

dalam internal umat muslim membutuhkan metode-metode dan pendekatan-pendekatan filosofis untuk memenangkan tujuan kelompok masing-masing. Pelan-pelan umat muslim membangun tradisi filosofisnya tersendiri.¹⁹

Firqoh pertama kali yang muncul dalam sejarah pemikiran ilmu Kalam Islam adalah Syi'ah. Kelompok ini memiliki ambisi politik dan garis perjuangan yang sangat jelas, yaitu menyerahkan kepemimpinan umat muslim pasca Rasulullah saw. kepada sahabat Ali bin Abi Thalib r.a. dan keturunannya. Pelimpahan jabatan pemimpin semacam itu berdasarkan pada hadits shahih yang disabdakan oleh Rasulullah saw. di hadapan khalayak ramai umat muslim. Mengingat sabda Rasulullah saw berada dalam bimbingan wahyu Tuhan maka otomatis wasiat atau penunjukan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib r.a. sangatlah sakral, suci dan kudus.²⁰

Tentu saja, setiap kepentingan politik memiliki rival-rival yang tidak kalah cerdasnya. Kubu oposan yang paling getol menyerang setiap inci pemikiran argumentatif dari kelompok Syi'ah adalah para pendukung Muawiyah. Setelah khalifah Ustman bin Affan r.a. meninggal dunia dan Ali bin Abi Thalib r.a. menggantikan jabatan sebelumnya, Muawiyah mengambil alih komando gerbong politik pendukung Utsman r.a. Tentu saja, untuk meraih dan mempertahankan jabatan sebagai khalifah, Muawiyah tidak sekadar melakukan manuver-manuver politik berupa agitasi dan kudeta melainkan juga membangun basis epistemologis bagi *harakah siyasiyah* yang ia bangun.

Ali Syami An-Nasyar²¹ mengutip suatu petikan pidato politik khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ketika berhasil mengambil alih kekuasaan dari tangan Ali bin Abi Thalib r.a. Muawiyah berteriak lantang, “kalau Allah tidak meridai saya menjadi khalifah maka mustahil saya menjadi khalifah seperti

¹⁹ Ali Sami An-Nasyar, *Nasy'at al-Fikr al-Falsafati fi al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1977), hlm. 59-60

²⁰ Abu Fatah Abdul Karim bin Abu Bakar Ahmad Asy-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 146

²¹ Ali Syami An-Nasyar, *Nasy'at al-Fikr al-Falsafati fi al-Islami*, *ibid.*, hlm. 231-232

sekarang. Kalau Allah benci kepada saya maka tak lama lagi Allah akan mengganti saya dengan orang lain.” Pernyataan ini sangatlah sederhana dan mudah menghipnotis orang awam. Tetapi, di tangan para intelektual muslim yang mendukung gerakan politik Muawiyah, pernyataan politis tersebut dijadikan landasan filosofis untuk membangun suatu aliran ilmu Kalam yang baru, yang di kemudian hari disebut Jabariyah.

Jabariyah secara umum adalah aliran teologis yang memberi ruang kepada kuasa Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia jauh lebih luas daripada kekuasaan manusia mengatur dirinya sendiri. Tentu saja para pendukung kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan tidak kesulitan menemukan dalil-dalil al-Quran dan hadits yang mendukung keyakinan dasar aliran Jabariyah ini. Sebagaimana kelompok Syi’ah yang melandaskan perjuangan politiknya pada ayat al-Quran dan Hadits Nabi tentang keistimewaan Ali bin Abi Thalib, kelompok oposan Jabariyah juga berhasil mengumpulkan dalil-dalil *naqli*.

Tidak cukup ada dua partai (Syi’ah dan Jabariyah), generasi umat muslim awal meramalkan perbedaan dengan membentuk firqoh ketiga yang dikenal dengan nama Khawarij (orang-orang yang keluar). Sebutan ini sangat sesuai dengan model perlawanan orang-orang Khawarij karena mereka menyatakan keluar dari dua golongan yang sudah ada dan membentuk golongan baru. Makna ‘keluar’ di sini dapat diartikan secara politis maupun teologis. Pengertian ‘keluar’ secara politis berarti kelompok ketiga ini tidak mendukung ide kepemimpinan Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kebetulan mereka berdua berdarah Quraisy.

Khawarij tampil ke panggung politik dengan membawa gagasan yang lebih humanis dan inklusif, yaitu bahwa kepemimpinan umat muslim boleh berada di tangan siapapun, tidak harus dari orang-orang Quraisy, bahkan orang ‘Ajami (non-Arab) pun boleh. Siapapun pribadi orang itu, selagi memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin umat dan menaati hukum Allah swt., maka ia berhak menjadi pemimpin umat muslim. Dalam pandangan kaum Khawarij, pemimpin-pemimpin yang pernah ada sebelumnya, seperti Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan beserta massa pendukung masing-masing, telah

keluar dari hukum Allah swt. Dua kelompok mainstream itu telah menjadikan logika dan kepentingan politik sebagai dasar utama dalam menentukan perbuatan, bukan hukum Allah swt. Dengan pertimbangan semacam itulah, Khawarij memfonis kafir semua pihak yang terlibat dalam Perang Shiffin dan proses Tahkim di daerah Daumatul Jandal.²²

Sampai di sini dapat dimengerti bahwa keyakinan-keyakinan teologis dan argumentasi-argumentasi rasional filosofis yang berkembang pesat dalam sejarah pemikiran Islam sangatlah kontekstual dan bertujuan untuk memenuhi tuntutan jaman. Para *mutakallimun* (pakar ilmu *Kalam*) dan disiplin *Kalam* yang dihasilkannya adalah produk-produk sejarah yang sama sekali profan dan tidak sakral. Sementara dalil-dalil naqli yang digunakan oleh masing-masing firqoh hanyalah suplemen tambahan untuk memperkuat argumentasi mereka dengan menghadirkan interpretasi-interpretasi subjektif. Tentu saja, subjektifitas di sini tetap selalu diupayakan terlihat ilmiah di meja akademis yang siap menerima kritik dan revisi.

Para *mutakallimun* menyadari bahwa seluruh produk pemikiran mereka terbuka untuk mendapat masukan konstruktif. Tetapi, kesadaran yang sama selalu nihil di mata para pendukung fanatik, sehingga produk sejarah yang profan tersebut ditingkatkan levelnya menjadi sakral, terlebih dengan banyaknya dalil-dalil *naqli* (al-Quran dan hadits) yang bisa didatangkan dalam jumlah yang tak terbatas. Ketergelinciran pemahaman orang awam semacam ini sering kali diperparah oleh para ideolog dengan melakukan cara-cara indoktrinasi, menghilangkan tradisi kritisisme, mengabaikan dialektika idealisme historis, dan menyembunyikan fakta-fakta empiris.

Dunia pendidikan tidak lagi mencetak ilmuan-ilmuan yang bisa berkontribusi besar kepada kemajuan pengetahuan dan peradaban umat manusia melainkan melahirkan orang-orang yang fanatis buta yang rela mengorbankan nyawa mereka demi membela kebenaran ideologis, filosofis dan tentu saja 'yang tampak sakral nan kudus'. Lembaga pendidikan seakan-akan kehabisan akal

²² Ali Syami An-Nasyar, *Nasy'at al-Fikr al-Falsafati fi al-Islami*, *ibid.*, hlm. 232

untuk mengembalikan kejayaan Islam masa lalu melalui perannya dalam mengkader generasi muda yang kritis, moderat, dan bijak.

Penggalian yang dalam untuk mendapatkan spirit sejarah pemikiran Islam sangatlah penting diterjemahkan ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Tenaga pengajar diharapkan memiliki potensi yang memadai untuk mengerti apa sejatinya spirit sejarah dan bagaimana mememanfaatkannya menjadi modal pengajaran bagi peserta didik. Materi-materi pelajaran harus mendukung terbentuknya suatu pengetahuan komprehensif-kritis, supaya peserta didik tidak mendapatkan pengetahuan yang dangkal tentang Islam, terlebih saat mereka mempelajari sejarah pemikiran.

3. Sejarah Perkembangan Tasawuf

Sebagaimana ilmu fiqih dan kalam yang memiliki konteks historisnya, tasawuf juga lahir dalam ruang dan waktu tertentu. Setelah perang Karbala meletus dan cucu Rasulullah saw., Husein bin Ali, terbunuh maka pada saat itulah muncul kelompok-kelompok yang menyebut diri mereka sebagai *Tawwab* (orang-orang yang bertaubat), *Bakkain* (orang-orang yang meratapi dosa), *Ubbad* (orang-orang yang memilih untuk beribadah saja), dan *Zuhhad* (orang-orang yang memutuskan meninggalkan kepentingan duniawi). Untuk semua alasan itulah, tasawuf didefinisikan oleh Al-Karakhi (w. 200 H.) sebagai tindakan berpegang teguh kepada hal-hal hakiki dan meninggalkan segala hal yang ada pada makhluk.²³

Lahirnya disiplin tasawuf atau sufisme dalam sejarah Islam tidak lepas dari respon sosial-politik yang dinilai telah sangat kotor dan rusak. Dalam pandangan orang-orang Sufi, kehidupan duniawi sangatlah artifisial, tidak hakiki, dan harus ditinggalkan demi meraih kebahagiaan sejati di akhirat nanti. Fakta empiris yang diajukan oleh *mutasawwifin* (orang-orang Sufi) tidak dapat dibantah dan kenyataannya memang menunjukkan bahwa generasi awal sahabat Nabi dan tabi'in saling berperang satu sama lain, mengedepankan ego masing-masing demi meraih kebenaran-

²³ Abu Qasim al-Qusyairi, *ar-Risalah al-Qusyairiyah*, (Kairo: Darl al-Kutub al-Haditsah, t.t.), hlm. 552

kebenaran artifisial, nisbi, dan tidak nyata, yaitu kebenaran yang hanya ada dalam pikiran manusia.

Sufisme datang menawarkan jalan penyelamatan manusia di dunia dengan menawarkan kebenaran dan kebahagiaan hakiki di akhirat. Metode-metode yang bisa ditempuh beragam. Pada awal pertumbuhan tasawuf, model tasawuf Sunni berkembang pesat, yaitu suatu aliran sufisme yang lebih mengutamakan pengamalan syariat dengan menjauhi kehidupan duniawi. Ajaran-ajaran syariat dalam Islam seperti shalat wajib, shalat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, dzikir, istighfar, dan lainnya adalah lebih diutamakan. Tanpa mengerjakan syariat agama maka hakikat kebahagiaan dan ketentraman dunia maupun akhirat tidak akan pernah tercapai. Oleh karenanya, ada banyak *maqamat* (stasiun-stasiun) yang harus dilalui oleh para *salik* (pencari kebahagiaan hakiki) agar segera sampai pada *haqiqat*.²⁴

Mutasawwifin di awal-awal pertumbuhan tradisi sufisme banyak memilih untuk meninggalkan kancah perpolitikan dan terlibat aktif dalam pengajaran dan pendidikan di *halaqah-halaqah* (pengajian-pengajian) di *zawiyah-zawiyah* (pojok-pojok masjid). Dengan meninggalkan politik praktis, guru-guru sufi dapat menghabiskan waktunya dengan mengajar dan mengkader generasi-generasi penerus yang lebih berbudi pekerti. Tetapi dalam perkembangan sejarahnya, model perjuangan semacam itu kurang efektif dan perubahan radikal yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tercapai. Mutasawwifin menempuh metode yang baru agar bisa tetap eksis dan berpengaruh langsung kepada dunia politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Sejak saat itulah, terminologi-terminologi sufistik seperti *zuhud* yang semula mendorong orang untuk non-aktif dalam kegiatan duniawi mengalami pergeseran makna. *Zuhud* tidak lagi diartikan meninggalkan dunia dan berbuat pasif dalam kehidupan melainkan tetap terlibat dalam setiap detail kehidupan duniawi dengan menjaga keterikatan hati dengan Allah swt.

Melalui strategi pergeseran makna dan inovasi dalam pengajaran sufisme maka tidak sedikit mutasawwifin berasal

²⁴ Said Aqil Siradj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, *ibid.*, hlm. 70

dari golongan-golongan yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat. Ada banyak contoh yang bisa disebutkan di sini, di antaranya adalah Imam Junaid sebagai pengusaha botol minuman, Al-Hallaj sebagai pengusaha kain tenun, Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, Abu Sa'id Al-Kharraj sebagai pengusaha konveksi, Abu Hasan asy-Syadzili sebagai petani, dan Fariduddin al-Attar sebagai pedagang parfum.²⁵ Dengan kata lain, seorang Sufi dapat tetap menjalani kehidupan sebagai manusia normal tetapi hatinya sudah tidak lagi terikat dengan kepentingan duniawi. Inilah arti *zuhud* yang mengalami pergeseran dan menjadi lebih populer di kemudian hari.

Namun demikian, sebagaimana yang terjadi pada disiplin ilmu fiqh dan kalam, kecenderungan dan minat subjektif seorang Sufi/Salik berpengaruh besar terhadap bangunan pemikiran sufisme yang dianut, dikembangkan, lalu diajarkan kepada murid-muridnya. Di sana kita melihat perkembangan terbaru dalam sejarah pemikiran tasawuf, yaitu Tasawuf Falsafi. Tema-tema yang diangkat tidak lagi persoalan etika-etika praktis yang bersentuhan langsung dengan detail kegiatan manusia sehari-hari melainkan melebar menjadi lebih teoritis filosofis, ontologis, bahkan cenderung kosmologis.

Orang-orang yang memiliki bergabung pada aliran tasawuf falsafi ini dituntut memiliki kecerdasan intuitif, imajinasi, dan rasionalitas yang tinggi. Pembahasan-pembahasan seperti emanasi, inkarnasionisme, *hulul*, *ittihad*, *wihdah*, *mahabbah*, dan lainnya menjadi wacana inti tasawuf falsafi ini.²⁶ Seorang intelektual dari Spanyol (Andalusia), Ibnu Arabi, dan dari Persia, Jalaluddin Rumi, dapat dijadikan sampel tokoh-tokoh pengembang aliran falsafi ini.

Dilihat dari segi karya-karya yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh sufisme aliran falsafi ini berbeda dari karya-karya para tokoh aliran Sunni. Sekalipun disiplin tasawuf sama-sama membicarakan persoalan etika dan budi pekerti, kaum sufis falsafi ini memiliki karya-karya sastra yang indah. Begitupun *syathahat* (aforisma)

²⁵ Said Aqil Siradj, *ibid.*, hlm. 76

²⁶ Sokhi Huda, *Tasawuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidiyah*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 37-38

yang keluar dari lidah mereka saat mengalami ekstase spiritual jauh lebih puitis imajinatif. Ketika Imam Al-Ghazali sebagai representasi Sufi aliran Sunni menulis *Ihya Ulumuddin* maka jenis karyanya berbeda dari *Matsnawi* karya Jalaluddin Rumi sebagai representasi Sufi aliran Falsafi.

Alhasil, apapun jenis aliran tasawufnya, siapapun tokoh pencetus ajarannya, semua itu tetaplah produk sejarah yang lahir dalam konteks jaman dan tempat tertentu. Sebagai produk sejarah maka ia tidak bisa dilepaskan dari karakteristiknya yang rentan akan kritik dan revisi, tentu saja dari pakar-pakar yang mumpuni. Sebab, setiap produk sejarah bersifat profan, bukan sakral seperti wahyu Tuhan. Sekalipun para tokoh Sufi menggunakan ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Nabi sebagai pendukung terhadap gagasan yang mereka bangun, seperti yang dilakukan oleh fuqaha maupun mutakallimun, status produk pemikiran mereka tetap bersifat profan dan kebenarannya sangatlah interpretatif.

Dunia pendidikan harus mampu memeras inti sari dan spirit sejarah pemikiran Islam yang semacam ini, kemudian menerjemahkannya dalam kurikulum, metode pengajaran, serta detail teknis edukasi lainnya demi menghasilkan anak didik yang kritis, moderat, serta bervisi ke depan. Karena status pemikiran sufisme yang semacam ini tidak banyak dimengerti oleh anak didik di lembaga-lembagapendidikan Islam, baik lembaga formal maupun informal, maka sangat sering terdengar suara-suara sumbang yang menilai sufisme sebagai bentuk perbuatan khurafat, pemikiran sufistik dianggal sebagai takhayul, dan label-label negatif lainnya. Padahal, dalam konteks sebagai produk pemikiran manusia yang lahir dalam ruang historis, status pemikiran-pemikiran Islam (baik di bidang fiqih, kalam, tasawuf) adalah sama saja, profan, dan tidak sakral. Sehingga perbuatan saling menegasikan tidaklah positif, apalagi berujung pada anarkisme.

C. Kurikulum Kritis yang Mengusung Spirit Perdamaian

Setelah mengerti hakikat dan spirit perkembangan pemikiran Islam sebagai produk sejarah yang terus berkembang, bersifat profan, dan selalu mungkin untuk direvisi, dimodifikasi dengan proses reformulasi ulang, maka diperlukanlah suatu sistem

pendidikan yang mendukung pembentukan atau penyusunan kurikulum kritis, yaitu suatu kurikulum pendidikan yang mengusung dan memungkinkan tercapainya spirit perdamaian. Kurikulum di sini memiliki tujuan utama, yaitu mencita-citakan out-put pendidikan yang kritis, moderat, cinta perdamaian, dan tentu saja menjunjung tinggi nilai-nilai Islam universal.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan salah satu wahana yang bisa digunakan untuk menjembatani antara idealisme pendidikan nasional dengan tuntutan jaman hari ini.²⁷ Menurut peraturan pemerintah, Perguruan Tinggi mempunyai fungsi dan tugas seperti dalam pasal 10 ayat 4, yaitu: 1) setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan sesuai dengan jenjang, 2) setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B, dan 3) setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.

Masalahnya, untuk mempelajari Islam secara komprehensif, sebagai bentuk implementasi KKNI, dibutuhkanlah kurikulum yang juga memberi ruang seluas-luasnya bagi tiga disiplin ilmu pengetahuan Islam yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lain. Ilmu Fiqih, *Kalam* dan Tasawuf adalah tiga disiplin ilmu pengetahuan yang tumbuh berkembang sepanjang perjalanan sejarah pemikiran Islam. Ketiga disiplin ilmu Islam ini membawa spirit keberagaman yang kritis, moderat, dan cinta damai.²⁸ Tetapi, di tangan-tangan oknum yang tidak bertanggungjawab, spirit ideali ini bisa saja dirusak. Cara-cara pengajaran agama

²⁷<http://sindiker.dikti.go.id/dok/permendikbud/Permendikbud73-2013JuklakKKNI.pdf>, diakses 29 Desember 2015

²⁸ Mohamad Abu Nimer, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam, Teori dan Praktek* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), hlm. 98

Islam didistorsi. Tema-tema humanis dalam Islam dipangkas. Kemudian, jihad-jihad anarkis diindoktrinasikan kepada peserta didik. Apabila hal ini terjadi maka KKNi yang dibuat pemerintah menemukan kendala besar yang berpotensi menggagalkan.

Jika menggunakan standar jenjang kualifikasi KKNi yang terdiri dari 9 (sembilan) tingkat itu maka indikator peserta didik yang sudah mencapai tingkatan ahli adalah tampaknya perilaku ideal dalam keseharian. Misalnya, seorang muslim sejati adalah orang yang melandasi setiap aktifitas sehari-harinya pada tiga disiplin tersebut dengan cara yang proporsional dan tidak berat sebelah. Seseorang yang terlalu *'fiqh-oriented'* mudah memaknai hidup secara 'hitam-putih', 'benar-salah', 'haram-halal'. Dimensi etis Islam, misalnya, seperti yang dikembangkan dalam disiplin tasawuf menjadi terabaikan. Begitupun sebaliknya, seorang muslim yang terlalu *'tasawuf-oriented'* secara berlebihan dapat mengabaikan dimensi rasional logis yang dikembangkan ranah *Kalam* (teologi). Apalagi jika mengamati argumentasi-argumentasi para teroris internasional itu, kecenderungan pada *'kalam-oriented'* sangat kentat.²⁹ Jadi, peserta didik yang ideal adalah mampu mengkombinasikan nilai-nilai Islam dalam dirinya sehingga memiliki pengetahuan Islam yang komprehensif, bersikap moderat, dan bervisi damai.

Dalam konteks global dunia Islam hari ini, pendidikan yang komprehensif, holistik, integratif, menjadi satu alternatif untuk menangkal kaum radikal yang direproduksi terus-menerus oleh sistem pendidikan mereka. Tetapi, dalam menjalankan dan melaksanakan kurikulum pendidikan yang ideal, yang mengintegrasikan antara ilmu fiqih, kalam, dan tasawuf, paradigma pengajaran yang kreatif dibutuhkan. Misalnya, lembaga pendidikan formal dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan informal seperti pondok-pondok pesantren, halaqah-halaqah Islam, dan komunitas-komunitas muslim lainnya.

Selain itu, paradigma kreatif juga bisa ditunjukkan dengan keterlibatan tenaga-tenaga pengajar yang memiliki

²⁹ Endung Turmudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 264

kualitas mumpuni, atau setidaknya menjalin komunikasi aktif dengan tokoh-tokoh agama (ulama, kiai, santri) yang kompeten-representatif. Beberapa *stakeholders* yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan itu juga harus memenuhi tiga klasifikasi kompetensi sebagaimana tiga jenis materi yang diajarkan (fiqih, kalam, tasawuf). Bagaimana mungkin ilmu tasawuf diajarkan oleh seorang guru yang lahir dari pendidikan formal, tanpa pernah mengenyam pendidikan pesantren yang terdidik dengan *mujahadah* dan *riyadah* batin.³⁰

Begitupun selanjutnya, untuk mengevaluasi hasil kerja pengajaran, lembaga pendidikan tidak bisa berdiri independen tanpa melibatkan para stakeholders turut campur dalam memberi penilaian. Proses evaluasi untuk mengerti pencapaian peserta didik tidak bisa diselesaikan dengan memberikan tugas berupa kertas ujian dengan sistem mengisi soal jawaban. Begitupun praktek yang harus dilakukan di perguruan tinggi, mahasiswa yang hendak diukur pencapaian mereka dalam mengerti pelajaran-pelajaran agama, khususnya fiqih, kalam dan tasawuf, tidak boleh ditangani oleh lembaga sendirian.

Pengabaian-pengabaian terhadap beberapa disiplin dengan mengarusutamakan satu disiplin sering terjadi dalam sejarah. Umat muslim menjadi berkubu-kubu, berkonfrontasi, bersaing mencari pendukung dan massa, dan anehnya terjerumus pada fanatisme buta dengan mengatakan disiplin pengetahuan yang dianutnya lebih utama daripada disiplin yang didukung orang lain. Golongan yang fanatik tasawuf mengatakan bahwa ilmu *Kalam* dan fiqih adalah tahapan dasar, bukan disiplin tertinggi, begitu sebaliknya, sehingga satu sama lain saling mengutamakan diri sendiri.³¹

30 Sering kali pendidikan dan doktrinasi radikalisme itu terjadi di lembaga-lembaga atau tempat-tempat pendidikan informasi. Jadi, lembaga-lembaga formal harus merambah ke arah yang lebih luas, guna memantau perkembangan tidak terkendali di luar lembaga pendidikan formal. Asrori S. Karni, *Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam*, (Bandung: Mizan Publika, 2009), hlm. XIV

31 Ketegangan antar disiplin ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam memang pernah terjadi dan tidak dapat dipungkiri. Itulah fakta sejarah yang tidak boleh diulangi, pengajarannya pun tidak boleh terulang kembali. Ahmad Musyafiq, *Reformasi Tasawuf Al-Syafi'i*, (Jakarta: Atmaja, 2003), hlm. 10

Pada tataran pendidikan, pengajaran sejarah pemikiran Islam tidak boleh dibiarkan hanyut pada arus ‘truth-claims’ seperti itu. Kurikulum memberikan ruang proporsional bagi setiap disiplin dengan menempatkan ketiganya setara. Sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan, fiqh, tasawuf dan *Kalam* adalah produk ciptaan manusia, yang dihasilkan melalui serangkaian penelitian metodologis sehingga menghasilkan satu kesatuan pengetahuan dan menjadi disiplin ilmu. Sebagai sebuah produk tentu ia adalah benda mati yang tidak boleh mengebiri kehendak bebas manusia.³² Kehendak bebas yang dimaksud di sini adalah potensi dan peluang yang dimiliki manusia untuk menjadikan tiga disiplin itu saling melengkapi, bukan saling menegasikan satu sama lain.

Dalam tataran prakteknya, disiplin *Kalam*, tasawuf dan fiqh diajarkan kepada peserta didik dengan jumlah waktu yang seimbang. Selain itu, tema-tema yang dibahas juga mencerminkan upaya-upaya untuk mengintegrasikan ketiga disiplin, misalnya, dengan meminimalisir aspek-aspek ajaran yang saling bertentangan. Contoh, jika mata pelajaran ilmu fiqh mengangkat tema rukun-rukun shalat maka mata pelajaran tasawuf membahas aspek-aspek esoterik dari setiap rukun shalat tersebut, begitu juga dengan mata pelajaran *Kalam* harus mengkaji makna-makna rasional-logis dari setiap gerakan dan bacaan yang menjadi rukun shalat.

Kurikulum yang tidak proporsional bisa saja terjadi dalam penerapan visi dan idealisme pendidikan sehingga praktek dan tujuan bagaikan pepatah ‘jauh panggang dari api’. ‘Mal praktek’ dalam dunia pendidikan ini disebabkan oleh dua hal: pertama, pengelola pendidikan tidak mengerti bagaimana mengejawantahkan kurikulum yang proporsional, dan/atau kedua, model kurikulum pendidikan yang idealis belum dirumuskan. Apabila dua faktor ini terjadi maka dampaknya dapat dilihat pada *out-put* pendidikan, yaitu peserta didik yang memiliki pemahaman parsial tentang Islam. Semisal, seseorang merasa benar berbuat anarkis demi menegakkan syiar Islam tanpa mengerti dimana pemahaman keislamannya itu diciptakan, untuk konteks dan tujuan sosial-politik seperti apa dirumuskan. Padahal, dengan

³² Reza A.A. Wattimena, *Filsafat dan Sains, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 208

pengetahuan yang komprehensif tentang Islam, seseorang akan mengerti bahwa Islam adalah agama yang progresif, kaya akan pemikiran, dan semestinya saling menghargai satu sama lain.³³

Adanya peserta didik yang berpikiran bahwa umat muslim membutuhkan sebuah negara yang secara formal disebut sebagai Negara Islam dengan sistem Kekhalifahan, atau bahwa umat muslim harus menumpas semua bentuk perbuatan khurafat, bid'ah, takhayul dalam tradisi dan kebudayaan, adalah bukti nyata belum meratanya kurikulum pendidikan yang integral-proporsional atau bahkan malah belum terwujud sama sekali. Sebab, pemikiran seperti itu hanya lahir dari lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan aliran pemikiran keislaman yang seragam, mengabaikan kritisisme yang sejatinya membantu peserta didik memahami konteks sosial-politik dari setiap pelajaran tentang pemikiran Islam. Minimnya penerapan kurikulum integral-proposional di lembaga-lembaga pendidikan berdampak pada lahirnya generasi muda muslim yang wawasan intelektualnya sempit.³⁴

Kita tahu bahwa di dalam sejarah pemikiran Islam terdapat satu aliran yang memperjuangkan berdirinya Negara Islam, tegaknya sistem kekhalfahan, tetapi pada saat yang sama, ada aliran lain yang menentang berdirinya negara Islam maupun sistem kekhalfahan tersebut. Selain itu, dalam sejarah pemikiran Islam, terdapat aliran yang dikenal sebagai gerakan puritanisasi atau pemurnian ajaran Islam dengan menawarkan kembali pada model kehidupan di jaman Rasulullah, tetapi pada saat yang sama, ada gerakan Islam yang menolak puritanisasi dengan menawarkan Islam yang progresif dan rahmatan lil alamin. Dalam konteks mengajarkan sejarah pemikiran Islam inilah, peran kurikulum yang integral-proporsional sangatlah urgen dan signifikan. Dengan kurikulum semacam itu diharapkan peserta didik menjadi mengerti konteks perdebatan, tujuan-tujuan sosial-politis-ekonomis yang melatarbelakangi, serta mengerti cara menempatkan diri pada posisi netral, kritis, dan moderat.

³³ Reza A.A. Wattimena, *Filsafat dan Sains, ibid.*, hlm. 278-280

³⁴ Gatra - Volume 11, Issues 20-24, 2005 hlm. 83. lihat juga Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologis*, (Jakarta: Alvabet, 2012), hlm. 15

D. Penutup

Menghadapi masa-masa mendatang yang penuh persaingan dan tantangan, generasi muda kita harus dicetak menjadi manusia unggulan, yang berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa dan negara, bukan terjerat oleh jaringan teroris atau bahkan mengancam ketahanan dan keamanan negara sendiri. Cita-cita ini dapat diwujudkan melalui perbaikan sistem pendidikan, terlebih pendidikan Islam, yang selama ini telah didistorsi besar-besaran oleh kalangan radikal. Secara diam-diam dan tersembunyi dari pantauan, radikal ini menjalankan program-program pendidikan dengan metode-metode yang mendukung tercapainya tujuan mereka, yaitu peserta didik yang berpikiran radikal fundamental.

Counter-attacks dapat dilakukan dengan cara yang sama, yaitu menyelenggarakan pendidikan ideal, yang mampu membentengi kesadaran intelektual peserta didik, sehingga mampu bersikap kritis, moderat, bervisi damai. Islam yang diajarkan di lembaga pendidikan dan pemahaman keislaman yang ditangkap oleh peserta didik adalah nilai-nilai humanisme universal, agama yang *rahmatan lil alamiin*, bukan nilai-nilai negatif yang justru menciderai citra Islam itu sendiri. Sebab, satu-satunya cara untuk melakukan *conter-attacks* yang efektif terhadap model pendidikan yang diterapkan kaum radikal fundamentalis adalah melalui jalur pendidikan yang serupa. Jika kaum radikal melakukan doktrinasi maka pendidikan yang ideal adalah membuka cakrawala kritis horizon intelektual peserta didik.

Langkah praktis untuk menerjemahkan idealisme pendidikan di atas adalah dengan membuat kurikulum pendidikan yang mampu menghadirkan ajaran Islam secara holistik, komprehensif, kritis-ilmiah. Konkritnya, materi-materi yang diajarkan harus dibuka dengan jujur, dibebaskan berdasarkan fakta historis, diinterpretasi berdasarkan pembacaan kritis, kemudian disampaikan dengan menyertakan visi moderatisme dan perdamaian (*peace-building*). Model pengajaran seperti ini sangat berat bila tanggungjawab sepenuhnya dipikulkan ke pundak lembaga pendidikan semata. Langkah-langkah kreatif dapat ditempuh jika sudah diperlukan guna melibatkan semua elemen masyarakat untuk turut berjasa, terutama mencetak output pendidikan yang betul-betul diharapkan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qahir bin Thahir bin Muhammad bin Abdullah Al-Baghdadi Al-Isfirayini, *al-Farqu baina al-Firoq*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t)
- Abu Fatah Abdul Karim bin Abu Bakar Ahmad Asy-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t)
- Abu Qasim al-Qusyairi, *ar-Risalah al-Qusyairiyah*, (Kairo: Darl al-Kutub al-Haditsah, t.t.)
- Ahmad Musyafiq, *Reformasi Tasawuf Al-Syafi'i*, (Jakarta: Atmaja, 2003)
- Ali Sami An-Nasyar, *Nasy'at al-Fikr al-Falsafati fi al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1977)
- Asrori S. Karni, *Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam*, (Bandung: Mizan Publika, 2009)
- Ben Farmer, "Paris Attack, What We Know about the Suspects", dalam <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france>, diakses pada 29 Desember 2015
- Bruce B. Lawrence, *Who Is Allah?*, (USA: University of North Carolina Press, 2015)
- Claude Berrebi, "Evidence about the Link Between Education, Poverty and Terrorism among Palestinians", dalam jurnal *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, Volume 3, Issue 1, Article 2, The Berkeley Electronic Press, 2007.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Grafindon, 1996)
- Endung Turmudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2005)
- Fedina S. Sundaryani, "Son of Bali bomber dies in Syria", dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/17/>, diakses 29 Desember 2015.
- Gatra - Volume 11, Issues 20-24, 2005.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UIP, 1986)

- <http://sindiker.dikti.go.id/dok/permendikbud/Permendikbud73-2013JuklakKKNI.pdf>, diakses 29 Desember 2015
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- J. Mark Halsteda, "Towards a Unified View of Islamic Education", dalam *Islam and Christian-Muslim Relations*, Volume 6, Issue 1, 1995 dan dipublikasikan online oleh Routledge, 2007.
- Max Abrahms, "What Terrorists Really Want: Terrorist Motives and Counterterrorism Strategy," dalam *International Security*, the President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology, Vol. 32, No. 4, 2008.
- Mohamad Abu Nimer, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam, Teori dan Praktek* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010)
- Mohammad Ali (penyunt.), *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Bagian I: Ilmu Pendidikan Teoritis*, (Jakarta: Grasindo, 2007)
- Mudjia Rahardjo, *Hermeneutika Gadamerian Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS(Anggota IKAPI), 2010)
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Grafindo, 1997)
- Nafisul Atho dan Arif Fahrudin, *Hermeneutika Transendental*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003)
- Nasr Hamid Abu Zaid, *Imam Syafi'i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, (Yogyakarta: LKiS, 2001)
- Poesprodjo, *Hermeneutika*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)
- Reza A.A. Wattimena, *Filsafat dan Sains, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Grasindoo, 2008)
- Said Aqil Siradj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006)
- Sarah Dingle, "Islamic State training new generation of Indonesian terrorists, expert Sidney Jones warns", dalam <http://www.abc.net.au/news/2015-10-08/>, diakses 29 Desember 2015.

Ibnu Rusydi

Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologis*, (Jakarta: Alvabet, 2012)

Scott Gerwehr dan Sara Daly, “Al-Qaida: Terrorist Selection and Recruitment”, dalam *Al-Qaidah and Global Jihad*, Santa Monica: RAND Corporation, National Defense Research Institute, 2006.

Sokhi Huda, *Tasawuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidiyah*, (Yogyakarta: LKiS, 2008)